



**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SAMBUTAN  
MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PADA ACARA**

**RAPAT KOORDINASI NASIONAL BIDANG  
KETENAGAKERJAAN  
TAHUN 2019**

**Jakarta, 8 Januari 2019**

***Yang saya hormati,***

- Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Kementerian Ketenagakerjaan;
- Para Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi Ketenagakerjaan;
- Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPT-P);
- Bpk/Ibu Peserta Rakornas Bidang Ketenagakerjaan 2019, dan Hadirin serta undangan yang berbahagia.

***Bismillahirrohmannirrohim***

***Assalamualaikum Wr. Wb.***

***Salam Sejahtera dan Selamat pagi.***

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas nikmat-NYA pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka mengikuti Acara Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2019. Dalam kesempatan yang baik ini pula, saya sekaligus mengucapkan Selamat Tahun Baru bagi kita semua. Semoga di tahun yang baru ini kita selalu meningkatkan semangat untuk melaksanakan berbagai amanah pembangunan ketenagakerjaan.

### ***Hadirin yang saya hormati,***

Tantangan dan kondisi pembangunan ketenagakerjaan terus berubah dan menjadi semakin berat. Kondisi dan tantangan **pertama** datangnya dari level global. Menurut International Monetary Fund/IMF (2018), pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2019 berada pada kisaran 3,7 %. Motor pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 ini tetap pada negara-negara kelompok negara berkembang yang diprediksikan tumbuh sebesar 4,7 %. Bahkan, pertumbuhan ekonomi negara-negara di ASEAN diproyeksikan lebih tinggi lagi, yaitu 5,2 %. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju diproyeksikan hanya sebesar 2,1 %. Ini artinya, pada saat ini dan masa-masa yang akan datang, ASEAN (termasuk Indonesia) telah dan akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi dunia. Oleh karena itu, kita semua perlu menatap masa depan bangsa ini dengan lebih optimis.

Namun demikian, di tengah ketidakpastian ekonomi global yang meningkat saat ini, Indonesia perlu meningkatkan iklim kemudahan berbisnis dan peringkat daya saing secara terus menerus dan berkelanjutan. Kemudahan berbisnis di Indonesia meningkat dari peringkat 114 pada tahun 2015 menjadi peringkat 73 pada tahun 2019 (World Bank, Doing Business Report, beberapa tahun). Sementara itu, indeks daya saing Indonesia menduduki peringkat 45 dari 140

negara pada tahun 2018 (World Competitiveness Index 2018, WEF).

Peringkat-peringkat ini memang semakin membaik, namun kita jangan cepat puas dan harus mampu mengejar daya saing Singapura (peringkat 2), Malaysia (peringkat 25), dan Thailand (peringkat 38), agar Indonesia benar-benar mampu mengaktualkan potensinya menjadi motor pertumbuhan ekonomi di regional ASEAN. Oleh karena itu, sektor ketenagakerjaan harus memberikan kontribusi dalam meningkatkan kemudahan berbisnis dan daya saing agar investasi semakin berkembang, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan kita bersama.

**Kedua**, kondisi dan tantangan di dalam negeri. Angkatan kerja kita hingga tahun 2018 masih didominasi oleh pendidikan SMP dan ke bawah, yaitu sebesar 57,46 % (BPS, Agustus 2018). Tingkat pengangguran terbuka terus menurun dan mencapai titik terendah selama masa reformasi, yaitu, 5,34 % (BPS, Agustus 2018). Seiring dengan menurunnya tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan ekonomi juga menurun. Tingkat kemiskinan berada pada titik terendah selama Republik Indonesia berdiri, yaitu 9,82 % (BPS,

Maret 2018). Sedangkan tingkat ketimpangan ekonomi sudah berada pada kategori ketimpangan rendah, karena sudah berada di bawah 0,4, yaitu 0,389 pada Maret 2018 (BPS).

### ***Hadirin yang berbahagia,***

Melihat berbagai perkembangan indikator pembangunan pada level global maupun nasional tersebut, dapat dikatakan bahwa pembangunan kita sesungguhnya sudah *on the track* atau berada pada jalur yang benar. Meskipun demikian, Bapak Presiden Joko Widodo tetap meningkatkan sejumlah capaian target pembangunan pada tahun 2019 (Perpres 72/2018 tentang RKP 2019):

- ❖ Pertumbuhan Investasi: 6,9 % - 7,7 %.
- ❖ Pengangguran: 4,8 % - 5,2 %.
- ❖ Kemiskinan: 8,5 % - 9,5 %.
- ❖ Kesenjangan: 0,38 – 0,39.

Arahan lainnya dari Bapak Presiden adalah menggeser fokus pembangunan dari infrastruktur ke Sumber Daya Manusia. Ini adalah komitmen dan *concern* Bapak Presiden yang telah disampaikan berulang kali di dalam berbagai kesempatan. Komitmen itu dinyatakan secara konkret dalam keberpihakan anggaran, sebagaimana yang terjadi di

Kemnaker yang anggaran meningkat dari Rp. 3,991 Triliun pada tahun 2018 menjadi Rp. 5,785 Triliun pada tahun 2019.

***Saudara-Saudara yang saya hormati,***

Menindaklanjuti arahan dan komitmen Bapak Presiden terhadap pembangunan SDM tersebut, maka di dalam pelaksanaan program dan anggaran tahun 2019, kita harus betul-betul amanah dalam melaksanakan tugas. Kita tidak bisa lagi bekerja sebagaimana biasanya (*business as usual*). Untuk itu, perlu melakukan perbaikan, percepatan dan terobosan di dalam pelaksanaan program dan anggaran 2019.

Terkait dengan peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, perlu fokus pada:

1. Masifikasi pelatihan kerja 277.424 orang (termasuk 10.000 pelatihan CPMI dan 32.000 orang di 1.000 BLK Komunitas),
2. Sertifikasi 526.189 orang,
3. Pemagangan 210.683 orang,
4. Koordinasi lintas sektor pelatihan vokasi nasional.

Terkait dengan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, hal-hal di bawah ini perlu mendapat perhatian :

1. Meskipun dalam kurun waktu 2015 hingga Desember 2018 Kemnaker telah berhasil menempatkan 10.340.690 orang atau sudah melampaui target penciptaan 10 juta lapangan kerja, namun penciptaan 2 juta lapangan kerja pada tahun 2019 harus tetap dilaksanakan, melalui informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri, dan perluasan kesempatan kerja (padat karya, wirausaha baru TKM, dan inkubasi bisnis);
2. Negara harus benar-benar hadir untuk memfasilitasi migrasi tenaga kerja Indonesia dan melindungi pekerja migran Indonesia, serta menggali peluang pasar pekerja migran Indonesia. Oleh karena itu, dari sisi regulasi, diperlukan percepatan penyusunan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, baik berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Menteri.

Adapun terkait dengan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan, hal-hal di bawah ini perlu mendapat perhatian :

1. Terobosan dalam mencapai kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan agar target 34 juta orang di tahun 2019 dapat tercapai.
2. Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, agar ditekankan pada isu keseimbangan beban antara perusahaan dan pekerja.
3. Konsep *unemployment benefit* harus diintegrasikan dengan *skill development fund* serta aturan pesangon yang berlaku.
4. Pengawasan ketenagakerjaan agar tetap dilanjutkan fokus pada perusahaan di sektor konstruksi dan perusahaan yang menggunakan bahan berbahaya, serta penarikan 18.330 pekerja anak.

### ***Hadirin yang berbahagia,***

Berdasarkan kondisi dan tantangan, serta selaras dengan arahan Presiden dan sejumlah fokus pembangunan ketenagakerjaan tahun 2019 tersebut, maka tema Rakornas ini, yaitu ***“Pembangunan Ketenagakerjaan Inklusif Untuk Indonesia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing”***, adalah tema yang sangat tepat. Tema ini mencerminkan keinginan kita untuk terus mendorong isu ketenagakerjaan dari isu pinggiran ke isu sentral dalam pembangunan. Upaya yang sangat krusial dalam konteks fokus pembangunan SDM tersebut, khususnya bidang



ketenagakerjaan, adalah adanya akses yang mudah, murah dan cepat bagi seluruh *stakeholder* agar dapat berpartisipasi aktif di dalam pembangunan ketenagakerjaan. Atau dengan kata lain, *no one left behind*. Inilah makna sebenarnya dari inklusifitas.

Oleh karena itu, dalam Rakornas kali ini saya meminta kepada saudara-saudara sekalian untuk saling berdialog, berdiskusi, dan memberikan solusi yang konstruktif bagi percepatan pelaksanaan program dan anggaran ketenagakerjaan tahun 2019, agar masyarakat dapat segera merasakan manfaat dari program-program ketenagakerjaan. Harus selalu diingat bahwa di era sekarang ini kecepatan adalah salah satu kunci keberhasilan.

***Saudara-Saudara yang saya hormati,***

Demikian beberapa hal pokok yang dapat saya sampaikan dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan 2019, maka dengan mengucapkan *Bismillahirrohmannirrohim* Rakornas Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2019 saya nyatakan dibuka secara resmi. Selamat bekerja !.

***Terima kasih,***

***Wallahul muwaffiq illa aqwaa mith thariiq,***

***Wasalamu'alaikum Wr. Wb.***

Jakarta, Januari 2019

Menteri Ketenagakerjaan,

M. Hanif Dhakiri